



Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Provokasi Korea Utara pada Era Yoon Suk Yeol

Amanda Bonfilia Candikia¹, Arfin Sudirman²

¹Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, amanda21012@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, arfin.sudirman@mail.unpad.ac.id

Corresponding Author: amanda21021@mail.unpad.ac.id¹

Abstract: Relations on the Korean Peninsula remain a persistent issue to discuss due to its conflictual inter-Korean relations despite their long shared history. Provocations by North Korea have increased since the inauguration of Yoon Suk Yeol as President of South Korea. This research examines South Korea's foreign policy under the Yoon Suk Yeol administration and how it has influenced North Korea provocations. This research employs the individual-level impact of Yoon Suk Yeol in shaping South Korea's foreign policy toward North Korean provocations. This research adopts a qualitative method focusing on non-numeric data collecting and analysis, also utilize psychobiography analysis and thematic content analysis to understand Yoon Suk Yeol's attitude and influence on South Korea's foreign policy toward North Korea. It finds that there's an influence from Yoon Suk Yeol's background, mainly from his career as a prosecutor, in the decision-making process during his administration. In addition, Yoon Suk Yeol's preference identified through content analysis of his inauguration speech indicates that he perceives North Korea as a tangible threats.

Keyword: Foreign Policy Analysis, Yoon Suk Yeol, Individual-Level Analysis, Korean Reunification, North Korea Provocations.

Abstrak: Hubungan di Semenanjung Korea merupakan isu yang kerap dibahas karena meskipun memiliki sejarah yang panjang, tetapi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dipenuhi konflik. Provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara melonjak setelah menjabatnya Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan. Penelitian ini mengkaji kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Yoon Suk Yeol yang mempengaruhi provokasi Korea Utara. Penelitian ini menganalisis faktor individu Yoon Suk Yeol dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non numerik, serta analisis psikobiografi dan analisis konten untuk memahami sikap dan pengaruh Yoon Suk Yeol terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Temuan dari riset ini adanya pengaruh latar belakang Yoon Suk Yeol, utamanya kariernya sebagai jaksa, dalam pengambilan keputusannya selama menjabat. Selain itu, preferensi Yoon Suk Yeol yang diketahui dari hasil analisis konten pidato inaugurasi menunjukkan bahwa Yoon Suk Yeol melihat Korea Utara sebagai ancaman yang nyata.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Luar Negeri, Yoon Suk Yeol, Analisis Level Individu, Reunifikasi Korea, Provokasi Korea Utara.

PENDAHULUAN

Korea Selatan dan Korea Utara memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari dinasti di Semenanjung Korea, penjajahan oleh Jepang, hingga wilayah Semenanjung Korea yang terbagi dua seperti sekarang (Lew, 2000). Setelah proklamasi kemerdekaan dari Republik Korea dan Republik Demokratik Rakyat Korea, kedua negara tidak terus menerus diwarnai oleh ketegangan, tetapi juga muncul perkembangan yang menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi dan reunifikasi. Pada tahun 1972 contohnya, kedua negara yaitu Republik Korea atau Korea Selatan dan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara menyelenggarakan sebuah pertemuan di Seoul dan Pyongyang. Meskipun perkembangan hubungan antara kedua negara tersebut terhambat akibat provokasi Korea Utara, Korea Selatan dan Korea Utara tetap mengupayakan perbaikan hubungan mereka (Daniela & Soemantri, 2024). Keinginan untuk menyatukan Semenanjung Korea sudah ada sejak presiden pertama Korea Selatan, yaitu Syngman Rhee, dan tetap menjadi kebijakan yang tidak terlepas dari Korea Selatan sejak saat itu.

Setelah dihadapkan dengan metode yang lebih kooperatif dari Moon Jae In sebagai kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, presiden Korea Selatan selanjutnya Yoon Suk Yeol menggunakan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya (Park, 2024). Pada tahun yang sama setelah Presiden Yoon menjabat, Korea Utara menembakkan rudal ke arah Semenanjung Korea. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, pihak Korea Utara melakukan bentuk provokasi besar yang telah merusak perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dengan melakukan peluncuran rudal tersebut. Pada Desember, provokasi Korea Utara pun kembali dilakukan dengan menerbangkan pesawat tanpa awak menyeberangi Korea Selatan (Tempo, 2022). Tidak berhenti sampai di situ, Yoon secara eksplisit menyatakan bahwa Korea Utara menimbulkan "ancaman serius" bagi stabilitas regional, sebuah pernyataan yang mencerminkan pergeseran retorika yang signifikan dari era sebelumnya. Presiden Korea Selatan ini menegaskan pentingnya koordinasi respons bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk menghadapi uji coba rudal Korea Utara yang mencapai rekor 65 kali peluncuran sepanjang tahun 2022. Pendekatan ini menandai kembalinya Korea Selatan ke kebijakan konservatif tradisional yang mengutamakan pencegahan militer daripada keterlibatan diplomatik (Shin, 2023).

Meskipun ada banyak jenis provokasi yang cukup mengganggu kedamaian antar kedua negara Korea tersebut selama ini, akan tetapi cita-cita kedua negara dalam melakukan upaya damai di Semenanjung Korea ini seakan langsung sirna. Dalam pernyataan Kim Jong Un, beliau menyatakan bahwa reunifikasi tidak lagi menjadi tujuan Korea Utara. Bahkan, beliau menyebutkan bahwa Korea Selatan merupakan musuh utama mereka, yang sebelumnya julukan "musuh utama" hanya ditujukan untuk negara Amerika Serikat. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan menghancurkan patung reunifikasi yang telah ada sejak dulu sebagai simbol dari cita-cita kedua negara tersebut. Selain itu, Kim Jong Un juga membubarkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk berdialog dengan Korea Selatan dan bekerja sama dengan Korea Selatan. Bahkan, Kim Jong Un sampai menghancurkan jalan dan rel kereta yang dirancang sebagai penghubung kedua negara tersebut apabila cita-cita reunifikasi ini terjadi (Amerise, 2024).

Meningkatnya provokasi dari masa menjabat Yoon Suk Yeol hingga dihancurnya patung reunifikasi ini kemudian mendukung pemikiran bahwa Korea Utara benar-benar menutup kemungkinan terjadinya reunifikasi pada era Yoon Suk Yeol. Reunifikasi yang dicita-citakan oleh banyak orang dan melekat dengan sejarah Semenanjung Korea ini mengalami progres yang menurun. Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan pada era Yoon Suk

Yeol yang lebih keras dibandingkan era sebelumnya membuat terjadinya penurunan progres reunifikasi. Reunifikasi dan perdamaian di Semenanjung Korea yang sebelumnya terlihat mungkin terjadi, sayangnya saat era Yoon Suk Yeol menjadi terlihat semakin sulit terjadi. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut alasan pemerintahan Yoon Suk Yeol mengalami penurunan progres reunifikasi yang dilihat dari sikap yang diambil Korea Selatan. Hal tersebut yang kemudian mendorong periset untuk melakukan penelitian ini.

Teori yang akan diadopsi untuk menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan adalah konsep dari Hudson & Day (2020) yang merupakan *multi-level analysis*. Hudson & Day (2020) membagi analisis kebijakan luar negeri ke dalam beberapa level untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Setiap level tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk hasil akhir dari kebijakan luar negeri. Dalam memahami kebijakan-kebijakan luar negeri, perlu juga melihat keunikan individu-individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Terdapat lima komponen yang dibawakan Hudson antara lain, individual, kelompok, identitas dan budaya, politik domestik, serta atribut nasional dan sistem internasional. Meskipun dalam kebijakan yang dikeluarkan pada era Yoon Suk Yeol merupakan hasil dari terlibatnya berbagai pihak, akan tetapi penulis menyoroti peran dari Yoon Suk Yeol itu sendiri. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh individu Yoon Suk Yeol dalam kebijakan luar negeri menurut Hudson dapat melalui latar belakangnya, yaitu psikobiografi, serta melalui wawancara dan pidato, yaitu analisis konten.

Tujuan dari riset ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara, serta memahami dan menjelaskan alasan pemerintah Yoon Suk Yeol mengalami kemunduran proses reunifikasi dalam menyikapi provokasi Korea Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologisnya. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik. Dalam penelitian ini, periset menerapkan metode studi kasus kualitatif yang berfokus dalam riset berbasis internet dan penelaahan terhadap dokumen dan arsip untuk menelusuri dan menganalisis sikap serta respons Korea Selatan terhadap berbagai bentuk provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara selama masa pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol.

Dalam pelaksanaan riset ini, peneliti menggunakan dua unit analisis, yaitu sikap pemerintah Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai objek riset, serta Yoon Suk Yeol, terkhusus pada pembuatan kebijakan luar negeri dan pertahanan selama masa pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai unit eksplanasi. Periset akan berfokus pada pola sikap dan kebijakan yang muncul dalam menghadapi berbagai bentuk provokasi dari Korea Utara, serta bagaimana variabel-variabel internal dan eksternal memengaruhi formulasi respons tersebut.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan memfokuskan kajian pada beberapa tema utama yang berkaitan dengan isu yang diteliti, yaitu terkait sikap Pemerintah Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol, yang mencakup pernyataan resmi, kebijakan, serta pidato-pidato dari presiden dan kabinet terkait. Kemudian data terkait kepribadian dan latar belakang Yoon Suk Yeol yang mencakup biografi Yoon Suk Yeol, wawancara, serta pidato-pidato dan pernyataan resmi Yoon Suk Yeol. Riset ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provokasi Korea Utara terhadap Korea Selatan memang kerap terjadi sejak dulu yang berakar dari jejak historis Semenanjung Korea, termasuk dengan kejadian Perang Korea pada tahun 1953. Meskipun tingkat provokasi pada era Moon Jae In sedikit mereda, akan tetapi pada era Yoon Suk Yeol dinamika di Semenanjung Korea berubah. Sejak awal masa pemerintahan Yoon Suk Yeol pada Mei 2022, hubungan antar-Korea menunjukkan penurunan yang ditandai dengan meningkatnya uji coba rudal oleh Korea Utara. Berdasarkan data dari *Beyond Parallel CSIS Database* (2025), Korea Utara telah melakukan lebih dari 80 kali peluncuran rudal selama periode 2022–2024, jumlah tertinggi sejak 2017. Frekuensi uji coba ini tidak hanya menandakan modernisasi kekuatan militer Pyongyang, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk tekanan politik terhadap kebijakan luar negeri keras Seoul yang menekankan *deterrance* dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat serta Jepang.

Uji coba rudal balistik antar-benua (ICBM) pada November 2022 menjadi salah satu titik krusial, di mana rudal tersebut jatuh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang setelah melintasi wilayah udara internasional di Laut Jepang. Korea Selatan merespons dengan meningkatkan kesiagaan militer dan menggelar latihan gabungan dengan Amerika Serikat. Presiden Yoon dalam pidatonya menegaskan bahwa setiap provokasi akan dihadapi dengan "pembalasan tegas" (The Straits Times, 2023). Tingkat provokasi Korea Utara sejak 2022 melonjak secara drastis dan berangsur hingga 2024. Selama tahun 2023, pola peluncuran rudal semakin tak terprediksi. Selain itu, Korea Utara mengirimkan lebih dari 1.000 balon berisi sampah, puntung rokok, dan limbah plastik ke wilayah perbatasan Korea Selatan (CSIS, 2024). Puncak perubahan paradigma Korea Utara terhadap Korea Selatan terjadi ketika Kim Jong Un memerintahkan pembongkaran Monumen Reunifikasi Nasional di Pyongyang pada Januari 2024 (The Guardian, 2024). Tindakan ini bukan hanya simbol penolakan terhadap reunifikasi, tetapi juga deklarasi ideologis bahwa dua Korea kini dianggap sebagai "dua negara yang bermusuhan secara permanen".

Proses pembuatan kebijakan luar negeri Korea Selatan, termasuk kebijakan terhadap Korea Utara, mengikuti pola institusional yang sangat terpusat pada peran presiden. Dalam sistem pemerintahan semi-presidensial Korea Selatan, Presiden memiliki otoritas dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional (Kim, 2021). Hal ini sesuai dengan konstitusi Korea Selatan yang menempatkan Presiden sebagai *Commander-in-Chief* sekaligus penentu utama strategi diplomasi negara. Kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon Suk Yeol menekankan orientasi kebijakan luar negeri yang berakar pada nilai-nilai liberal, kemitraan strategis dengan sekutu-sekutu tradisional seperti Amerika Serikat dan Jepang, serta penegasan terhadap prinsip *peace through strength* dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Berbeda dengan pendekatan dialog progresif pada masa Presiden Moon Jae-in, Yoon mengedepankan pendekatan keras terhadap Pyongyang, menolak kompromi sepihak, dan memfokuskan kebijakan pada upaya penangkalan (*deterrance*) militer dan koordinasi internasional yang lebih erat (The Korea Times, 2023). Salah satu kebijakan utama yang menandai arah diplomasi Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara adalah *Audacious Initiative*, yang diperkenalkan pada Agustus 2022. Inisiatif ini menawarkan bantuan ekonomi skala besar kepada Korea Utara sebagai imbalan atas langkah nyata menuju denuklirisasi.

Selain *Audacious Initiative*, pemerintah Yoon juga memperkuat sistem pertahanan nasional melalui kebijakan *Three-Axis Defense System* yang terdiri atas *Kill Chain* (serangan *pre-emptive*), *Korea Air and Missile Defense* (pertahanan udara dan rudal), dan *Massive Punishment and Retaliation* (balasan besar-besaran). Sistem ini menjadi pilar utama dalam menghadapi eskalasi militer Korea Utara yang meningkat sejak 2022, termasuk uji coba rudal balistik jarak menengah dan peluncuran satelit pengintai. Kebijakan pertahanan ini juga diperkuat dengan penguatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan

Jepang. Selain aspek militer dan diplomatik, kebijakan luar negeri Yoon Suk Yeol juga menyinggung isu kemanusiaan. Meskipun retorikanya keras, Yoon Suk Yeol tetap membuka ruang bagi kerja sama kemanusiaan bersyarat, seperti bantuan untuk anak-anak dan ibu hamil di Korea Utara melalui lembaga internasional. Namun, bantuan tersebut dilaksanakan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh rezim Pyongyang. Dalam hal ini, Kementerian Unifikasi Korea Selatan berperan penting dalam memfasilitasi kebijakan lintas batas yang terkait dengan hubungan antar warga. Meski demikian, berbagai program kerja sama ekonomi lintas perbatasan, seperti *Kaesong Industrial Complex*, tetap ditutup karena alasan keamanan dan sanksi internasional (MOFA Korea, 2023).

Yoon Suk Yeol merupakan presiden ke-13 Korea Selatan yang menjabat pada tahun 2022 hingga awal tahun 2025. Yoon Suk Yeol lahir dalam kondisi keluarga kelas menengah terpelajar latar keluarga di mana lingkungan akademis tersebut berperan dalam pembentukan orientasi intelektual awalnya, Yoon Suk Yeol lahir dari pasangan profesor. Ayahnya, Yoon Ki-Jung, adalah seorang ekonom terkemuka di Universitas Yonsei yang ikut mendirikan Korean Statistical Society dan menjadi anggota National Academy of Sciences. Ibunya, Choi Jeong-Ja, mengajar di Universitas Wanita Ewha sebelum meninggalkan posisi tersebut untuk menikah. Yoon Suk Yeol lulus dari Universitas Nasional Seoul dengan gelar sarjana pada tahun 1983 dan magister pada tahun 1988 dalam bidang hukum. Karier lapangan Yoon bermula sebagai jaksa pada era 1990-an. Praktik profesionalnya dipenuhi dengan penanganan kasus-kasus besar, termasuk penyidikan terhadap pejabat tinggi dan perusahaan konglomerat. Gaya penyelidikan Yoon yang tegas dan sering dianggap independen dari tekanan politik menempatkannya dalam kategori jaksa yang berani dan meningkatkan citra publiknya (Volle, 2025). Masuknya Yoon ke arena politik formal berlangsung cepat setelah pengunduran diri dari posisi kejaksaan. Dengan dukungan Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party, PPP), Yoon Suk Yeol mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2022 dan memenangkan kontestasi tersebut.

Analisis Psikobiografi

Dengan latar belakangnya tersebut, dapat dianalisis kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pada era Yoon Suk Yeol. Barber dan Post merupakan ahli dalam menganalisis masa lalu pemimpin negara. Barber sendiri mengembangkan empat kategorasi skema untuk pemimpin negara, yang dibagi menjadi aktif-pasif dan positif-negatif. Aktif-pasif sendiri merupakan dimensi yang melihat tingkat energi seorang pemimpin dan inisiatif seorang pemimpin. Di sisi lain, positif-negatif menyangkut motivasi dan pandangan hidup. Untuk dimensi aktif-pasif Yoon Suk Yeol cenderung tergolong sebagai kategori pemimpin yang aktif. Hal tersebut terbukti dari Yoon Suk Yeol yang cenderung mengambil inisiatif kebijakan secara langsung dengan memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, serta pendekatannya yang lebih tegas dengan Korea Utara. Sikapnya yang dikategorikan sebagai aktif ini dipengaruhi juga oleh pengalamannya sebagai jaksa yang mengharuskannya untuk inisiatif.

Sementara pada dimensi positif-negatif, Yoon Suk Yeol cenderung terkategorikan sebagai negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan motivasi dan gaya kepemimpinannya yang digerakkan oleh kewajiban moral, kecemasan terhadap sebuah ancaman, dan tanggung jawab terhadap keamanan negara. Yoon Suk Yeol yang telah berkecimpung di dunia kejaksaan cenderung memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Menurut Barber, tipe ini dicirikan oleh tingkat aktivitas yang tinggi namun didorong oleh tekanan psikologis, kewajiban, dan kecemasan strategis, sehingga cenderung menghasilkan kebijakan yang konfrontatif, kaku, dan berorientasi pada kontrol. Pola ini tampak dalam penurunan prioritas terhadap agenda reunifikasi yang berbasis rekonsiliasi serta meningkatnya penekanan pada *deterrance*, hukuman, dan penegakan norma internasional terhadap Korea Utara.

Di sisi lain, Jerrold Post juga mengembangkan analisisnya dengan metode anamnesis. Anamnesis yang pertama adalah psikobiografi yang mengkaji latar belakang keluarganya, trauma keluarga, figur pentingnya, dan pendidikan. Anamnesis yang kedua adalah kepribadian pemimpin. Dalam konteks ini, yang berusaha dikaji adalah apakah pemimpinnya memiliki *work-life balance*, kondisi biologisnya seperti apa, stabilitas emosinya, hubungan interpersonalnya, dan respons terhadap kritiknya seperti apa. Anamnesis yang ketiga adalah *substantive beliefs*. Hal ini menyangkut apa yang dilihat dan diyakini oleh pemimpin negara tersebut, termasuk ideologi politik. Anamnesis terakhir, yaitu gaya kepemimpinan. Anamnesis ini mengkaji cara pemimpin tersebut bertindak, termasuk gaya negosiasi, cara menghadapi konflik, kemampuan berpidato, dan strateginya.

Yoon Suk Yeol memiliki latar belakang yang berasal dari keluarga kelas menengah terdidik di Korea Selatan. pendidikannya yang menekankan disiplin hukum dan penegakan aturan, membentuk orientasi awal Yoon Suk Yeol terhadap konsep ketertiban, legalitas, dan keadilan yang sangat sesuai dengan prosedur. Sebagai figur yang meniti karier di birokrasi penegakan hukum, Yoon Suk Yeol menunjukkan ciri kepribadian yang relatif tinggi dalam hal kepercayaan diri, kontrol diri, serta orientasi tugas dibandingkan orientasi afektif. Pola ini terlihat dalam gaya komunikasinya yang sering kali kaku, langsung, dan kurang kompromisif, terutama dalam isu keamanan nasional. Yoon Suk Yeol memandang Korea Utara terutama sebagai ancaman strategis dan aktor revisionis yang tidak dapat dipercaya, sebuah keyakinan yang tercermin dalam penekanan kuat pada aliansi dengan Amerika Serikat, penguatan postur pertahanan, dan kritik terbuka terhadap pelanggaran resolusi internasional oleh Pyongyang. Gaya komunikasi Yoon yang formal dan legalistik, preferensi terhadap strategi yang jelas dan tegas, serta pendekatan negosiasi yang menekankan prinsip daripada fleksibilitas, mencerminkan tipologi pemimpin yang berorientasi pada *deterrence* daripada *confidence-building measures*.

Analisis Konten

Setelah adanya analisis psikobiografi, Hudson & Day (2020) juga melengkapi analisis psikobiografi dengan analisis konten. Analisis konten digunakan untuk menganalisis *trait*, motivasi dan karakteristik pemimpin sebuah negara tanpa perlu observasi secara langsung. Analisis konten ini menganalisis tulisan dan ucapan yang dikeluarkan oleh pemimpin dan mengaitkannya dengan kepribadian, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap kebijakan luar negaranya. Terdapat empat tema yang penulis kategorikan, yaitu persepsi terhadap perilaku Korea Utara untuk melihat bagaimana Yoon Suk Yeol memaknai tindakan Korea Utara dengan skala *friendly-neutral-hostile*. Kemudian terdapat persepsi niat strategis, untuk melihat pandangan Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara, apakah defensif oportunistis, atau agresif. Selain itu, dalam analisis kebijakan luar negeri niat strategis juga merupakan inti untuk melihat persepsi ancaman. Skala untuk tema ini adalah *defensive-ambiguous-aggressive*. Selanjutnya adalah persepsi kapabilitas Korea Utara. Hal ini untuk melihat seberapa berbahaya Korea Utara, dengan skala *weak-moderate-strong*. Terakhir, respons terhadap de-escalasi Korea Utara. Hal ini untuk melihat bagaimana penafsiran Yoon Suk Yeol terhadap sinyal damai atau provokasi dari Korea Utara, dengan skala *genuine-skeptical-deceptive*.

Dari pidato inaugurasi Presiden Yoon Suk Yeol pada 10 Mei 2022, terlihat bahwa Korea Utara sejak awal masa kepemimpinan Yoon Suk Yeol diposisikan sebagai aktor eksternal yang bermasalah, khususnya dalam konteks keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam pidato tersebut, Yoon Suk Yeol secara eksplisit menyebut program senjata nuklir Korea Utara sebagai ancaman, tidak hanya bagi keamanan nasional Korea Selatan, tetapi juga bagi stabilitas Asia Timur Laut secara lebih luas (Yonhap, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perilaku Korea Utara dipersepsikan secara negatif dan berbahaya, sehingga dapat dikategorikan sebagai *hostile behavior* dalam kerangka evaluatif Holsti. Dengan menekankan dimensi ancaman regional, Yoon tidak membingkai provokasi Korea

Utara sebagai insiden terbatas, melainkan sebagai pola perilaku yang berisiko sistemik terhadap tatanan keamanan regional. Persepsi negatif terhadap perilaku Korea Utara tersebut kemudian diperkuat oleh cara Yoon Suk Yeol memandang niat strategis Pyongyang. Dalam pidato inaugurasi, Yoon Suk Yeol tidak menyatakan bahwa Korea Utara memiliki niat damai. Sebaliknya, Yoon Suk Yeol menggunakan formulasi bersyarat dengan menyatakan bahwa kerja sama dan dukungan internasional hanya akan diberikan “*if North Korea genuinely embarks on a process to complete denuclearization*” (Yonhap, 2022). Pilihan kata “genuinely” menjadi indikator penting dalam analisis tematik, karena menunjukkan keraguan mendasar terhadap ketulusan niat strategis Korea Utara. Dengan demikian, niat Korea Utara dikonstruksikan sebagai ambigu dan belum dapat dipercaya, sehingga memerlukan pembuktian melalui tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan politik.

Selain itu, pidato inaugurasi Yoon Suk Yeol juga mengandung penilaian yang jelas terhadap kapabilitas Korea Utara. Dengan menyebut program nuklir Korea Utara sebagai ancaman serius terhadap keamanan Korea Selatan dan kawasan, Yoon Suk Yeol secara implisit mengakui bahwa Korea Utara memiliki kapabilitas militer yang signifikan dan berbahaya (Yonhap, 2022). Persepsi ini menempatkan Korea Utara dalam kategori *strong capability*, khususnya dalam dimensi senjata nuklir. Dalam analisis konten tematik Holsti, pengakuan terhadap kapabilitas lawan yang tinggi, ketika dikombinasikan dengan persepsi niat yang ambigu atau negatif, berkontribusi pada pembentukan *threat perception* yang kuat. Dengan demikian, ancaman Korea Utara tidak hanya dipahami sebagai potensi, melainkan sebagai risiko nyata yang memerlukan respons kebijakan serius. Meskipun demikian, pidato inaugurasi Yoon Suk Yeol tidak sepenuhnya menutup ruang de-escalasi. Yoon Suk Yeol secara eksplisit menyatakan bahwa “*the door to dialogue will remain open*” sebagai bagian dari upaya penyelesaian damai terhadap ancaman Korea Utara (Yonhap, 2022). Namun, tawaran dialog ini bersifat sangat kondisional dan bergantung pada langkah denuklirisasi yang nyata dari pihak Korea Utara. Dalam kerangka analisis Holsti, respons terhadap sinyal de-escalatif seperti ini dapat dikategorikan sebagai *open but skeptical*. Artinya, Yoon Suk Yeol menunjukkan kesediaan normatif untuk dialog, tetapi pada saat yang sama mengekspresikan ketidakpercayaan struktural terhadap motif Korea Utara.

Korelasi antara kepemimpinan Yoon Suk Yeol dan eskalasi konflik di Semenanjung Korea tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons rasional terhadap dinamika sistem internasional, melainkan perlu dianalisis melalui interaksi antara individu pemimpin dan wacana kebijakan luar negeri yang dihasilkannya. Dalam kerangka *Foreign Policy Analysis* sebagaimana dirumuskan oleh Hudson dan Day (2020), individu pengambil keputusan merupakan variabel kunci. Melalui psikobiografi Yoon Suk Yeol dan analisis konten tematik terhadap pidato inaugurasi beliau, memberikan landasan untuk memahami mengapa kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Yoon cenderung bersifat konfrontatif dan berkontribusi pada peningkatan eskalasi konflik dengan Korea Utara. Latar belakang Yoon Suk Yeol sebagai jaksa membentuk orientasi kognitif yang legalistik, normatif, dan berfokus pada penegakan aturan. Dalam pandangan dunia semacam ini, aktor yang melanggar norma tidak dipahami sebagai mitra politik yang setara, melainkan sebagai pelanggar yang harus diberi sanksi agar tercipta keteraturan. Orientasi psikologis tersebut tercermin secara konsisten dalam konten tematik pidato dan pernyataan kebijakan Yoon Suk Yeol sejak awal masa jabatannya. Analisis konten menunjukkan bahwa terdapat persepsi Yoon Suk Yeol mengenai Korea Utara didominasi oleh tema ancaman, provokasi, dan ketidakpatuhan terhadap norma internasional.

Dengan demikian, korelasi antara kepemimpinan Yoon Suk Yeol dan eskalasi konflik Korea Utara tidak hanya bersifat kausal dalam arti kebijakan-ke-reaksi, tetapi juga bersifat kognitif dan diskursif. Psikobiografi Yoon membentuk cara ia memahami Korea Utara, analisis konten mengungkap bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam narasi

kebijakan, dan narasi tersebut pada akhirnya menghasilkan kebijakan luar negeri yang cenderung memperkuat dinamika eskalasi konflik.

KESIMPULAN

Provokasi Korea Utara yang meningkat juga pada akhirnya menyebabkan hubungan di Semenanjung Korea memanas dan menjadi tidak mungkin untuk terjadinya reunifikasi. Dengan menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri Hudson & Day (2020), penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Yoon Suk Yeol dengan level analisis individu. Level analisis individu yang dibawa oleh Hudson dan Day ini menggunakan analisis psikologis, seperti analisis psikobiografi dan analisis konten tematik. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh latar belakang Yoon Suk Yeol, utamanya kariernya sebagai jaksa dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya selama menjabat, termasuk kebijakan Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara. Selain itu, preferensi Yoon Suk Yeol yang diketahui dari hasil analisis konten pidato inaugurasi menunjukkan bahwa Yoon Suk Yeol melihat Korea Utara sebagai ancaman yang nyata. Latar belakangnya dan preferensi politiknya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan tentunya memberikan dampak pada hubungan dengan Korea Utara. Setelah masa pemerintahan Moon Jae In yang memberikan perdamaian sementara di Semenanjung Korea melalui kebijakan-kebijakannya yang persuasif dan pendekatannya yang halus, pemerintahan Yoon Suk Yeol di sisi lain cenderung melakukan pendekatan dan kebijakan yang keras sehingga hal tersebut meningkatkan provokasi Korea Utara. Peningkatan provokasi Korea Utara tentunya dianggap sebagai ancaman oleh Korea Selatan, sehingga hubungan di Semenanjung Korea menjadi lebih tegang dibanding sebelumnya.

REFERENSI

- Amerise, A. (2024). *Mengapa Kim Jong-un abaikan cita-cita penyatuan Korut dengan Korsel?* BBC News World. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j0w126z950>
- Cha, V. D. (2011). “Rhee-strain”: The Origins of the U.S.-ROK Alliance 1 Victor D. Cha Georgetown University. *International Journal of Korean Studies*, XV(1), 1–15.
- CSIS. (2024, January 6). *Garbage balloons and Korean unification values*. <https://www.csis.org/analysis/garbage-balloons-and-korean-unification-values>
- CSIS. (2025, May 28). *Database: North Korean Provocations*. Retrieved from Beyond Parallel: <https://beyondparallel.csis.org/database-north-korean-provocations/>
- Daniela, N. A., & Soemantri, A. I. (2024). South Korea and North Korea: Differences in Ideology and Their Impact on War. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(3), 277–286. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i3.8462>
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). Foreign policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 3th Edition. In *Foreign Policy Analysis. Classic and Contemporary Theory*.
- Khoiriyah, S. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI ERA KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DAN MOON JAE IN TERHADAP RESOLUSI KONFLIK SEMENANJUNG KOREA. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 65–75.
- Lew, Y. I. (2000). Brief History of Korea.
- Muhamad, S. V. (2016). Isu Keamanan Di Semenanjung Korea Dan Upaya Damai Parlemen. *Isu Keamanan Di Semenanjung Korea Dan Upaya Damai Parlemen*, 1–23. https://www.academia.edu/35692435/Analisis_Uji_Coba_Nuklir_Korea_Utara_yang_Merupakan_Terror_terhadap_Keamanan_Internasional?rhid=28583801878&swp=rr-rw-wc-26088423
- MOFA Republic of Korea. (2023, June 8). The Yoon Suk Yeol Administration's National Security Strategy. Diambil kembali dari MOFA Korea: https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_25772/view.do?seq=16&page=1

- Park, J. (2024). *South Korea's Strategic Responses Toward North Korea's Nuclear Force Policy* (Issue March) [National Chengchi University]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25940.41605>
- Petrič, E. (2013). Foreign policy : from conception to diplomatic practice. In *Foreign policy : from conception to diplomatic practice*.
- Roza, R. (2024). Melemahnya upaya damai di semenanjung korea. In *Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepékan---II-PUSLIT-Maret-2024-244.pdf
- Shin, M. (2023). *Yoon Says North Korea Poses 'Serious Threat.'* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2023/01/yoon-says-north-korea-poses-serious-threat/>
- Tempo. (2022). *Akhiri Tahun 2022, Korea Utara Uji Coba Tiga Rudal*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/internasional/akhiri-tahun-2022-korea-utara-udi-coba-tiga-rudal-234299>
- The Guardian. (2024, January 24). *North Korea demolishes the Arch of Reunification monument*. <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/24/north-korea-demolishes-the-arch-of-reunification-monument-south-korea-unity-hopes>
- The Korea Times. (2023, January 1). *Yoon calls for ready-to-fight spirit, firm retaliation against NK*. <https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/northkorea/20230101/yoon-calls-for-ready-to-fight-spirit-firm-retaliation-against-nk>
- The Straits Times. (2023). *South Korea's Yoon warns of stern retaliation in case of North Korea's provocation*. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-koreas-yoon-warns-of-stern-retaliation-in-case-of-north-koreas-provocation>
- Volle, A. (2025, November 19). *Yoon Suk Yeol President of South Korea*. Diambil kembali dari Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Yoon-Suk-Yeol>
- Yonhap News. (2022, May 10). *Full text of President Yoon's inaugural address*. Diambil kembali dari Yonhap News Agency: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20220510005900315>
- Zubaidah, A. A. (2019). CONCILIATOR VS BLOC LEADER : PERBANDINGAN KEBIJAKAN BARACK OBAMA & DONALD TRUMP. UMY.